

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kinerja implementasi pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Bandung berdasarkan teori Analisis Kinerja Robbins yang mencakup lima indikator utama: kualitas, kuantitas, kerja sama, inisiatif, dan kehandalan/tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan pendidikan inklusif antara kedua jenis sekolah. SD Swasta Assalaam lebih unggul dalam penyediaan fasilitas, tenaga pendamping, serta program pelatihan bagi guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Sementara itu, SD Negeri 206 Putraco Indah menghadapi kendala dalam keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan bagi tenaga pengajar, serta jumlah siswa inklusi yang lebih banyak dibandingkan dengan SD Swasta.

Secara keseluruhan, SD Swasta menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam berbagai aspek, termasuk dalam kualitas pembelajaran, keterlibatan orang tua, serta kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan siswa inklusi. Sementara itu, SD Negeri cenderung menghadapi lebih banyak tantangan karena keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, SD Swasta mampu memberikan layanan pendidikan inklusif yang lebih optimal dibandingkan dengan SD Negeri yang masih bergelut dengan berbagai kendala struktural. Hal ini juga didukung oleh perspektif dari orang tua siswa di SD Negeri yang menyatakan bahwa memang terdapat ketimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama dalam hal fasilitas dan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus. Orang tua merasa bahwa program inklusi di SD Negeri belum berjalan secara optimal, baik dari segi kesiapan tenaga pengajar maupun dukungan

sarana yang memadai, sehingga berdampak pada perkembangan anak-anak mereka di lingkungan sekolah.

Faktor utama yang menghambat keberhasilan pendidikan inklusif di SD Negeri adalah keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan guru, serta ketidakseimbangan antara jumlah siswa inklusi dengan fasilitas yang tersedia. Di sisi lain, kendala utama yang dihadapi SD Swasta adalah biaya pendidikan yang lebih tinggi, yang membuat akses bagi siswa inklusi dari keluarga kurang mampu menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di Kota Bandung. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan guru, terutama bagi SD Negeri, agar tenaga pendidik memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, perlu ada peningkatan sarana dan tenaga pendamping untuk SD Negeri guna memastikan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang lebih optimal. Kebijakan seleksi penerimaan siswa inklusi juga perlu diperjelas agar jumlah siswa yang diterima tidak melebihi kapasitas sekolah. Selanjutnya, baik sekolah negeri maupun swasta perlu memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal seperti psikolog, terapis, serta lembaga pendidikan inklusif untuk mendukung kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan penerapan kebijakan yang lebih komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pendidikan inklusif di Kota Bandung dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

4.2. Saran

Pendidikan inklusif memiliki dampak positif tidak hanya bagi siswa inklusi, tetapi juga bagi siswa non-inklusi, serta berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih inklusif. Namun, manfaat tersebut hanya dapat terwujud jika

implementasi pendidikan inklusif dilakukan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi pihak Sekolah Dasar, Pemerintah Kota Bandung, dan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di wilayah ini.

Upaya yang perlu dilakukan mencakup optimalisasi pelatihan dan persiapan bagi para guru serta tenaga pendidik yang terlibat dalam program pendidikan inklusif. Pelatihan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan para pendidik dalam menangani kebutuhan khusus siswa inklusi, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang tepat. Selain itu, penyediaan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dalam mendampingi siswa inklusi sangat penting, agar mereka dapat memberikan arahan yang jelas kepada guru reguler dalam mengelola kelas inklusif dengan efektif.

Selain aspek pengembangan kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel juga merupakan faktor krusial. Sekolah perlu memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat mendukung proses pembelajaran bagi siswa inklusi, termasuk alat bantu pendidikan yang sesuai. Dengan demikian, siswa inklusi akan dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah dan setara bersama siswa non-inklusi.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang maksimal akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi semua siswa untuk berkembang, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh pihak.